

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi gabungan kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy) dan inflasi Nasional sebesar 3,05% (yoy). Sejalan dengan penurunan tekanan inflasi, level inflasi Provinsi NTT berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi terutama bersumber dari komoditas beras dan pisang menjadi pendorong laju inflasi

Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy) lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTT sebesar 1,92% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) . Sejalan dengan penurunan tekanan inflasi, level Kabupaten Sumba Timur berada pada rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi bersumber dari kenaikan harga beras, tomat, ayam hidup, ikan kakap merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, minyak goreng, bawang putih, sirih dan angkutan udara menjadi faktor pendorong inflasi Kota Waingapu. Beras menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat Kota Waingapu yang tinggi, sedangkan produksinya rentan mengalami gejolak karena faktor cuaca membuat petani gagal panen. Komoditas lainnya yang menjadi pendorong inflasi juga mengalami kenaikan akibat keterbatasan produksi karena curah hujan yang tinggi dan angkutan udara mengalami kenaikan karena maskapai penerbangan yang ada cuman satu saja di triwulan I.

Di sisi lain, penurunan harga ikan tembang, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/kan gembolo/ikan aso-aso, ikan tenggiri, kangkung, cabai rawit, bawang merah, tahu mentah, dan susu bubuk untuk balita menjadi faktor penahan inflasi Kota Waingapu. Harga ikan tembang, ikan kembung di Waingapu mengalami penurunan akibat tangkapan nelayan yang sedang banyak. Sementara itu, kangkung, cabai rawit juga mengalami penurunan harga akibat pasokan yang sedang banyak karena telah memasuki masa panen.

Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Sumba Timur adalah risiko terhadap munculnya El-Nino dan virus-virus pada ternak, yang akan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok dan mempengaruhi permintaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya permintaan masyarakat, sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud

adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timor yang memiliki

tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.

2. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau asymmetric information antar pelaku di

tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.

3. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas

strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga

4. Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT menjadikan lahan bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Sumba Timur terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan OPD terkait, stakeholders, maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah, Kabupaten Sumba Timur telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai arah kebijakan pengendalian inflasi. Termasuk guna menjaga stabilisasi inflasi di daerah, Kabupaten Sumba Timur telah memiliki program unggulan yang bekerjasama dengan seluruh instansi, lembaga dan stakeholders terkait lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, serta melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kabupaten Sumba Timur setiap triwulannya serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Optimalisasi TTIC sebagai pusat distribusi bahan pangan pokok yang didukung dengan modal dan fasilitas yang memadai.
2. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
3. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.
4. Pembentukan database surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabe dan Bawang Merah).
5. Melakukan pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan
6. Pelatihan warga dibidang teknologi, pertanian organik, dan usaha tani.
7. Pendampingan bagi kelompok tani dibidang penerapan pertanian organik berbasis teknologi dan manajerial kelembagaan.

Program lahan percontohan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dibimbing langsung oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) berbasis teknologi dan pertanian organik.

9. Pengembangan unit pengolahan pupuk dan pestisida organik.
10. pengembangan unit pengolahan pasca panen padi organik sehingga dapat meningkatkan nilai jual ke wilayah lain.
11. pengembangan koperasi unit desa (KUD) atau BUMDES.
12. kebijakan penerapan pertanian organik kepada masyarakat dan keikutsertaan menjadi anggota koperasi unit desa (KUD) atau BUMDES.
13. menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan kesempatan menembus pasar ke wilayah lain.
14. Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
15. melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
16. Melaksanakan optimalisasi kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH).
17. Mengakselerasi pemulihan sektor pertanian dan peternakan dengan membentuk klaster komoditas yang sering mendorong inflasi seperti klaster bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit.
18. Pengadaan kapal penangkap ikan kapasitas besar dan alat bantu penangkapan ikan/pukat dan penguatan kelembagaan dan ketrampilan nelayan dalam rangka menekan biaya produksi ikan.
19. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.
20. Pemanfaatan tol laut.
21. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
22. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.